

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki arti penting bagi sebuah daerah, khususnya bagi kabupaten yaitu sebagai perencanaan keuangan, pelaksanaan Otonomi Daerah, peningkatan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, APBD memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola keuangan dan pembangunan suatu kabupaten. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan dana dengan tujuan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Menurut BPK RI yang dikutip dalam Kompas (2019), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mencerminkan manajemen keuangan daerah serta anggaran bisa menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang baik penting dilakukan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam pengelolaan APBD dapat berdampak negatif bagi daerah seperti salah kelola atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara dapat menimbulkan akibat hukum, baik pidana

maupun perdata, kemudian kesalahan pengelolaan APBD dapat menyebabkan penggunaan dana publik yang tidak efektif dan dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan daerah serta Kesalahan pengelolaan APBD dapat menyebabkan penyimpangan keuangan, seperti korupsi, penggelapan, dan penipuan. Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan APBD menggunakan pengukuran kinerja keuangan daerah, untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah diperlukan analisis tertentu, salah satunya menggunakan metode analisis rasio keuangan (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021). Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD. Menurut Patarai (2016:197) rasio keuangan dapat menentukan ukuran dari kinerja keuangan daerah berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD.

Menurut data Kemendagri RI yang dikutip dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor berhasil menduduki peringkat 10 besar kategori Kabupaten dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi se-Indonesia tahun 2022 dengan capaian sebesar 81,33%. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat yang ikut melaksanakan otonomi daerah dan salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta yang terletak di selatan. Sebagai pemerintah daerah, selain memikirkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah kabupaten bogor juga harus mampu mengelola APBD. Perencanaan anggaran dan realisasi APBD sangat

penting dilakukan karena berguna untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya pada tahun berikutnya. Kinerja suatu badan instansi lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan diwujudkan dalam laporan realisasi anggaran, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor  
Tahun 2017-2022**

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Surplus/(Defisit)
2017	Rp6.975.053.078.040	Rp3.041.872.447.905	Rp3.781.900.015.038	Rp6.875.742.319.986	Rp 99.310.758.054
2018	Rp7.300.485.379.647	Rp2.794.660.740.152	Rp3.945.601.285.124	Rp7.305.059.632.892	(Rp 4.574.253.245)
2019	Rp8.137.989.873.806	Rp3.161.165.915.498	Rp4.381.882.134.630	Rp7.771.218.179.777	Rp366.771.694.029
2020	Rp7.687.179.717.004	Rp2.810.155.352.282	Rp4.126.378.593.406	Rp8.405.493.380.579	(Rp718.313.663.575)
2021	Rp9.124.623.007.868	Rp3.761.911.243.274	Rp4.729.476.665.520	Rp8.708.394.133.531	Rp416.228.874.337
2022	Rp9.029.607.236.616	Rp3.736.339.670.708	Rp5.282.559.672.996	Rp9.310.402.757.366	(Rp280.795.520.750)

Sumber: Diolah oleh peneliti (BPKAD Kabupaten Bogor, 4 September 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pendapatan daerah di Kabupaten Bogor dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 pendapatan daerah kabupaten Bogor mengalami penurunan sebesar Rp450.809.826.802 dari Rp8.137.989.873.806 ke Rp7.687.180.047.004 dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 pendapatan daerah kabupaten bogor mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp1.437.442.960.864 serta tahun 2022 pendapatan daerah kabupaten Bogor mengalami penurunan lagi sebesar Rp95.015.771.252 dari Rp9.124.623.007.868 ke Rp9.029.607.236.616. Kemudian, Dana perimbangan Kabupaten bogor pada tahun 2017-2022 lebih besar jika dibandingkan dengan PAD, jika pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan masih lebih tinggi daripada sumber yang berasal dari PAD, hal

tersebut mungkin menunjukkan bahwa pendanaan dari pihak luar masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih aktif mencari potensi ekonomi yang ada di daerahnya dan meningkatkan pendapatan yang berasal dari dalam daerah.

Selain itu, berdasarkan Tabel 1.1 dari tahun 2017-2022 Kabupaten Bogor mengalami defisit anggaran daerah pada tahun 2018, 2020 dan 2022. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan pengeluarannya. Rendahnya pendapatan daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor belum mampu dalam menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Dengan naik turunnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD akan mengidentifikasi naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat beberapa faktor yaitu faktor yang mendukung serta menghambat kinerja keuangan Kabupaten Bogor. Tujuan dari faktor-faktor tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor dalam mengelola APBDnya.

Beberapa penelitian yang terdahulu telah menganalisis kinerja keuangan dalam mengelola APBD pada Kabupaten yaitu, penelitian Saputra (2023) menyatakan bahwa “kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan hasil rasio masing-masing indikator kinerja keuangan”. Penelitian oleh Ramadhan (2022) menyatakan bahwa “kinerja keuangan daerah

Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah karena rasio – rasio yang digunakan sebagai pengukuran menunjukkan angka yang belum maksimal dikarenakan ada beberapa faktor – faktor penghambat”. Penelitian oleh Krisniawati et al. (2021) menyatakan bahwa “PAD Kabupaten Aceh Timur pada anggarannya masih besar dibandingkan dengan realisasinya, kemudian untuk subsidi pada pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman mengalami perkembangan setiap tahunnya begitu pula dengan belanja daerah yang setiap tahunnya meningkat sesuai dengan realisasinya. kebutuhan pembangunan daerah. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan perhitungan rasio termasuk dalam kriteria belum mandiri, tidak efektif namun efisien”.

Penelitian oleh Saputra et al. (2018) menyatakan bahwa “varian pendapatan termasuk dalam kategori baik, rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, varian belanja termasuk dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional dan rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien”. Serta penelitian oleh Candra (2023) menyatakan bahwa “Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti adalah pemerintah daerah dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan

realisasi anggaran yang dianggarkan sebelumnya serta menempatkan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penulisan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada (APBD) pada Kabupaten Bogor**”.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD pada Kabupaten Bogor di tahun 2017-2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengelola APBDnya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD pada Kabupaten Bogor di tahun 2017-2022.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengelola APBDnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat memperkuat/mendukung menggunakan rasio keuangan dalam menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten daerah. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang sama yaitu terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ide-ide untuk menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

###### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.